

## DKI Hapuskan Sanksi Tilang Uji Emisi, KLHK Langsung Minta Koordinasi

JAKARTA (IM) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku akan melakukan pembahasan dengan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya terkait pelaksanaan sanksi tilang uji emisi di Jakarta yang resmi dihentikan sejak Senin (11/9).

Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menilai sanksi penilangan justru efektif dilakukan untuk mendidik pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya.

"Selain memastikan kendaraan yang digunakan akan menggunakan bahan bakar efisien, pemilik kendaraan juga diharapkan dapat memastikan jika kendaraan bermotor mereka tak ikut menjadi penyumbang pencemaran udara," kata Sigit Reliantoro, Rabu (13/9).

Pihak KLHK mengaku akan melakukan pembahasan dengan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda

Metro Jaya terkait pelaksanaan sanksi tilang uji emisi di Jakarta yang resmi dihentikan sejak Senin kemarin.

"Jadi kita berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi, dengan polda. Ini memang minggu-minggu pertama yang kita harapkan. Khusus untuk sepeda motor itu, apabila ditilang berkaitan dengan penghidupan mereka maka yang diminta adalah mereka melakukan service kendaraan bermotornya," kata Sigit.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya sebelumnya resmi menerapkan tilang uji emisi yang berlaku mulai tanggal 1 September 2023.

Dalam penerapan tilang, mereka memberi sanksi dengan merujuk Pasal 285 dan Pasal 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan aturan tersebut pengendara sepeda motor yang melanggar aturan dikenakan sanksi denda Rp 250.000, sedangkan pengendara mobil Rp 500.000. ● yan

## DLH DKI Jakarta Segel Cerobong Pabrik Baja

JAKARTA (IM) - Selama dua pekan terakhir, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menindak empat industri nakal yang lalai mengelola lingkungan hidup atau mencemari lingkungan. Terbaru, Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum (PPH) serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH DKI Jakarta menyegel cerobong perusahaan peleburan baja PT Jakarta Central Asia Steel. Penyegekan itu dilakukan pada Rabu (13/9) dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor e-0154/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Jakarta Central Asia Steel, Jumat (8/9) lalu.

Ketua Sub Kelompok Penegakan Hukum DLH DKI Jakarta, Hugo Efraim menyebutkan ada temuan pelanggaran dalam penggunaan cerobong di perusahaan tersebut.

"Cerobong di perusahaan itu belum sesuai standar. Berdasarkan aturan, penggunaan cerobong reheating harus mendapatkan Sertifikat Layak Operasi (SLO)," ujar Hugo dalam keterangan resmi, Rabu (13/9).

Setelah menerima sanksi, kata Hugo, PT Jakarta

Central Asia Steel, diharuskan menghentikan operasional cerobong reheating dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, pihaknya tidak segan-segan membekukan sampai mencabut izin lingkungan perusahaan itu.

"Kami lakukan penyegelan cerobongnya untuk memperbaiki hingga sesuai standar, kami akan izinkan kembali sampai mereka bisa menunjukkan kembali SLO," ungkap Hugo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan DLH DKI Jakarta akan terus menyalir industri-industri yang berpotensi memiliki mencemari lingkungan terutama pencemaran udara.

"Kita akan periksa satu per satu industri di Jakarta yang memiliki potensi mencemari lingkungan," tegas Asep.

Ia pun menargetkan, pada 2030, semua industri di Jakarta harus benar-benar memiliki standar yang ramah lingkungan.

"Semuanya sudah diatur dalam Keputusan Gubernur No 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Semua industri di Jakarta harus rendah emisi," tutup Asep. ● yan

## 700 Gedung Milik Swasta di DKI Siap Pasang Generator Kabut Air

JAKARTA (IM) - Sekitar 700 gedung tinggi milik perusahaan swasta di DKI Jakarta siap dipasang pompa bertekanan tinggi (*water mist generator*) untuk membuat kabut air guna menekan polusi udara.

"Sudah ada sekitar 700 pemilik gedung. Mereka mendukung program dengan *water mist*," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/9).

Wali kota di setiap wilayah DKI Jakarta juga sudah mengumpulkan seluruh pemilik gedung swasta untuk menyosialisasikan pemakaian *water mist generator*.

Namun, Asep mengatakan, ketersediaan dan pengadaaan *water mist generator* untuk setiap gedung swasta di Ibu Kota masih terkendala.

Saat ini, pompa air sedang diproduksi Kementerian Koordinator Bidang

Maritim dan Investasi (Kemmarves) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Kalau sudah tersedia banyak, saya optimistis pemilik gedung pasti akan menyediakan alat *water mist*," ujar Asep.

Asep berharap, para pemilik gedung dapat berinisiatif memasang *water mist* sebagai alat kelengkapan gedung, sama seperti alat pemadam kebakaran.

"Sehingga, saat kualitas udara semakin memburuk, gedung-gedung swasta dapat bersama-sama menggunakan *water mist*," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menargetkan seluruh gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang pompa bertekanan tinggi (*water mist generator*) untuk menekan polusi udara.

"Nanti kita keliling. Kita cari waktu kapan gitu (untuk mengecek)," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Kantor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memasang *water mist generator* antara lain Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Begitu juga dengan Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kantor Wali Kota Jakarta Barat serta Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



## UJI COBA PERTAMA DI GEDUNG PERTAMINA

# Pemprov DKI Pertimbangkan Ekoenzim Senjata Baru Tangani Polusi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemmarves) soal penyemprotan ekoenzim. "Kemarin saya sudah sampaikan, itu (disarankan) koordinasi dulu ke pemerintah pusat, supaya hasilnya tidak sia-sia," kata Asep.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menguji coba penyemprotan ekoenzim untuk menangani polusi udara di Ibu Kota. Kepala

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, uji coba penyemprotan ekoenzim itu rencananya bakal dilakukan di Gedung Pertamina.

"Mudah-mudahan nanti sama seperti penggunaan *water mist*, uji coba dulu di Gedung Pertamina, kita ukur dengan alat pengukur," ujar Asep saat dikonfirmasi, Rabu (13/9).

Menurut Asep, uji coba itu serupa dengan penggunaan *water mist*, yakni untuk mengetahui tingkat efektivitas dari ekoenzim untuk mengatasi masalah kualitas udara buruk di Jakarta. "Water mist itu terbukti efektif untuk penurunan PM 2.5. Ini bisa kita uji coba juga hal yang sama ke ekoenzim," kata Asep.

Sebelum uji coba, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait

penggunaan ekoenzim mengatasi polusi udara.

"Kami koordinasikan dengan pemerintah pusat, karena selama ini belum pernah ada koordinasi terhadap penggunaan ekoenzim," ujar Asep.

Asep telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemmarves) soal penyemprotan ekoenzim.

"Kemarin saya sudah sampaikan, itu (disarankan) koordinasi dulu ke pemerintah pusat, supaya hasilnya

## PAMERAN INDONESIA ENERGY & ENGINEERING 2023

Pengunjung mengamati alat berat dalam pameran Indonesia Energy & Engineering (IEE) 2023 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/9). IEE 2023 yang menggabungkan delapan pameran berskala internasional penyokong berbagai sektor penting penggerak nasional, seperti sektor listrik dan energi, sektor tambang, sektor migas, sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, sektor pengecoran logam, maupun sektor pengolahan limbah berlangsung hingga 16 September 2023.

## KUA-PPAS APBD DKI 2024 Disepakati Rp81, 5 Triliun

JAKARTA (IM) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048.

"Dengan selesainya penjelasan eksekutif dan tanggapan anggota Badan Anggaran pada hari ini terkait rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,5 triliun disetujui," kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang dilansir dari website DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/9).

Prasetyo Edi mengetuk palu sebagai tanda persetujuan anggota Banggar yang telah melakukan pembahasan bersama TAPD selama dua hari sejak Senin hingga Selasa, 11-12 September kemarin dan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

Pada kesempatan yang sama, Ketua TAPD DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menjelaskan angka tersebut didapat dari proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan, serta pinjaman daerah untuk mendukung penanganan masalah sampah

dengan program refuse derived fuel (RDF) plant.

"Ketetapannya Rp81,5 triliun itu sudah termasuk dengan pinjaman ke PT SMI, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan utang," ucapnya.

Berikutnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD), Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2024 sudah melewati penghitungan perencanaan yang matang dan realistis.

"Untuk penyusunan anggaran 2024 kita sudah mencoba serialisasi mungkin. Kami sesuaikan dengan realisasi yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata dia.

Michael menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk melakukan pinjaman daerah dari PT SMI yang rencananya akan dipakai untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah dengan teknologi RDF. Menurutnya, pinjaman daerah baik yang jangka menengah maupun jangka panjang sesuai dengan regulasi harus atas persetujuan dewan.

"Kita masukkan bersamaan dengan KUA-PPAS 2024 dan surat persetujuan

dewan. Nilai tersebut sudah termasuk pembiayaan RDF Plant yang dapat pinjaman dari PT SMI," kata Michael.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu memaparkan besaran KUA-PPAS APBD 2024 Rp81,5 triliun terdiri atas rancangan proyeksi pendapatan daerah sepanjang 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,3 triliun; Pendapatan Transfer Rp19,2 triliun; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp72,1 miliar.

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,2 triliun yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun.

Rancangan belanja daerah sebesar Rp71,8 triliun dengan rincian; Belanja Operasi Rp58,8 triliun; Belanja Modal Rp11,4 triliun; Belanja Tidak Terduga (BIT) Rp1,1 triliun; dan Belanja Transfer Rp318,3 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,7 triliun yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun. ● yan

## Resmi Hentikan Proyek ITF, Pemprov DKI Tarik PMD dari Jakpro

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghentikan proyek Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Antara atau 'Intermediate Treatment Facility' (ITF).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi mengatakan, anggaran Penyerahan Modal Daerah (PMD) yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp517 miliar akan direlokasi.

Michael menjelaskan anggaran tersebut akan dimasukkan ke anggaran belanja prioritas.

"Kalau itu sudah dialokasikan kembali 'blended' dalam belanja prioritas," kata Michael, Rabu (13/9).

Anggaran PMD ITF tersebut nantinya direlokasi ke APBD Perubahan 2023.

"Kan adanya di APBD Murni 2023. Jadi saat dilakukan Perubahan APBD 2023, di sini dilakukan penyesunan kembali," tuturnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ITF. Heru lebih berfokus pada proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar setara batu bara melalui Refused Derived Fuel (RDF) Plant.

Saat ini, RDF Plant sudah

tidak sia-sia," kata Asep.

Asep menambahkan, penyempotan ekoenzim sebagai penanganan polusi udara di Ibu Kota itu berdasarkan usulan dari lembaga swadaya masyarakat yang menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono beberapa waktu lalu.

"Panggil Ekoenzim ini mereka mengusulkan kepada Pak Gubernur waktu kunjungan Pak Gubernur di acara di Budha Tsu Chi. Mereka mengusulkan supaya dilakukan *water mist* dengan Ekoenzim," kata Asep. ● yan

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI**  
PT. ELECTRONIC IDR EXCHANGE (Dalam Likuidasi)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 butir b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka dengan ini diumumkan bahwasanya masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi PT. ELECTRONIC IDR EXCHANGE (Dalam Likuidasi) sesuai dengan Neraca likuidasi akhir per tanggal 31 Agustus 2023 yang akan dibagikan secara proposional kepada Seluruh Pemegang Saham Perseroan (dalam likuidasi)

Jakarta, 14 September 2023  
Likuidator  
PT. ELECTRONIC IDR EXCHANGE (Dalam Likuidasi)



**AKSI STOP IMPOR MONYET DARI INDONESIA**  
Sejumlah aktivis dari Primates Fight Back memegang poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (13/9). Pada aksi tersebut mereka mendesak pemerintah Amerika Serikat tidak mengimpor monyet dari Indonesia.

**PENGUMUMAN PEMBUBARAN**  
Berdasarkan Keputusan pemegang Saham, yang telah dituliskan dalam akta Notaris, oleh YANI TRIMULYANI, SH., Mkn, Notaris di Kota Bekasi, tertanggal 11 September 2023 Nomor : 09, Bahwa seluruh pemegang saham telah memutuskan :

1. Membubarkan dan melikuidasi PT. KYJ INTERNATIONAL yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham ditanda tangani.
2. Menunjuk Direktur perseroan sebagai likuidator Perseroan ("Likuidator").

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan, untuk memenuhi ketentuan UU tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator  
Direksi PT. KYJ INTERNATIONAL

**PENGUMUMAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM**

Sesuai dengan pasal 127 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pengalihan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas PT. ANINDYA CIPTA MANDIRI, berdasarkan di Kota Depok ("Perseroan") tersebut telah disusun rancangan pengalihan saham yang ringkasannya sebagai berikut :

1. Rencana susunan pemegang saham pasca pengalihan adalah :
  - a. sebanyak 200 saham milik Nyonya R DEVI NATALIA E dialihkan kepada :
    - Nyonya NOVI RUBIANTI sebanyak 175 saham;
    - ZAINUDDIN H NASUTION sebanyak 25 saham;
  - b. sebanyak 125 Miliar R Rizki KOSWARADHANA kepada ZAINUDDIN H NASUTION;
2. Persyaratan dan tata cara pengalihan saham :
  - a. Pengalihan saham ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mengindahkan persetujuan yang diperlukan
  - b. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat menghubungi Direksi Perseroan, pada setiap hari kerja, Pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) WIB. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman di Surat Kabar
  - c. Setelah lewat jangka waktu tersebut, segala keberatan dari pihak ketiga manapun tidak dapat dilayani lagi

Dumai, 14 September 2023  
Direksi PT PUTRI SALJU SATRIA